

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA DI SMP ISLAM AL-ISTIQOMAH KARAWANG: TINJAUAN ASPEK PERENCANAAN, PENGADAAN, INVENTARISASI, PEMANFAATAN, PEMELIHARAAN, DAN EVALUASI

Nabilah Choirunnisa¹, Ajat Rukajat², Wahidin Wahidin³

^{1,2,3}MPI FAI Universitas Singaperbangsa Karawang

¹nabilahchoirunnisa@unsika.ac.id, ²ajat.rukajat@fai.unsika.ac.id,

³wahidin@fai.unsika.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the policy of managing facilities and infrastructure at SMP Islam Al-Istiqomah Karawang from the aspects of planning, procurement, inventory, utilization, maintenance, and evaluation. A descriptive qualitative method with a case study approach was used. Data were collected through semi-structured interviews, direct observation, and inventory document review. The informants included the principal, vice principal for facilities, three teachers, and three students. The results show that: (1) Planning is conducted through participatory needs identification with priority scales based on actual facility conditions, though not yet supported by written blueprint documents; (2) Procurement relies on BOS funds and foundation resources with clear procedures but constrained by budget limitations; (3) Inventory is managed manually through secondary inventory documents with annual updates; (4) Facility utilization applies internal rules including restrictions on Smart TV use for learning only; (5) Maintenance is conducted through biannual inspections, but repair delays occur due to budget limitations; (6) Evaluation is carried out through quarterly coordination meetings. Overall, the facilities management policy is functioning but requires strengthening in written documentation and maintenance consistency.

Keywords: management policy, facilities and infrastructure, planning, maintenance, evaluation, Islamic private school

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang ditinjau dari aspek perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan telaah dokumen inventaris. Informan penelitian meliputi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana, tiga orang guru, dan tiga orang siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan partisipatif dengan skala prioritas berdasarkan kondisi riil fasilitas, namun belum didukung dokumen blue print tertulis; (2) Pengadaan bersumber dari dana BOS dan yayasan dengan alur yang cukup jelas namun terkendala keterbatasan anggaran; (3) Inventarisasi dilakukan secara manual melalui dokumen inventaris sekunder dengan pembaruan berkala setiap akhir tahun ajaran; (4) Pemanfaatan fasilitas telah menerapkan aturan tertib internal, termasuk

pembatasan penggunaan Smart TV khusus untuk pembelajaran; (5) Pemeliharaan dilaksanakan melalui pengecekan berkala setiap enam bulan sekali, namun keterlambatan perbaikan masih terjadi akibat keterbatasan dana; (6) Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi tiga bulan sekali. Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah ini telah berjalan namun masih memerlukan penguatan pada aspek dokumentasi tertulis dan konsistensi pemeliharaan.

Kata kunci: kebijakan pengelolaan, sarana dan prasarana, perencanaan, pemeliharaan, evaluasi, sekolah swasta Islam

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang berperan penting dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya. Dalam konteks ini, kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan tenaga pendidik, tetapi juga oleh ketersediaan serta pengelolaan sarana dan prasarana yang memadai (Republik Indonesia, 2003).

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan komponen vital dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar yang efektif. Ketersediaan fasilitas fisik yang lengkap, seperti

ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan media pembelajaran, secara langsung memengaruhi kenyamanan serta konsentrasi belajar peserta didik. Namun, seluruh sarana tersebut tidak akan berdampak maksimal jika tidak diatur melalui kebijakan pengelolaan sekolah yang terencana, teratur, dan disesuaikan dengan skala prioritas kebutuhan (Gunawan, 1996).

SMP Islam Al-Istiqomah Karawang merupakan lembaga pendidikan swasta berbasis Islam yang berlokasi di Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang. Sekolah ini telah memperoleh akreditasi B dengan nilai 83 dan saat ini mengasuh 132 peserta didik yang terbagi ke dalam 5 rombongan belajar dengan 11 orang pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 30 Maret 2026, sekolah ini masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas, di

antaranya belum tersedianya laboratorium IPA mandiri dan ruang perpustakaan yang terpisah dari kantor guru.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah ini masih memerlukan perhatian lebih agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian terdahulu oleh Megasari (2014) menunjukkan bahwa peningkatan pengelolaan sarana dan prasarana berkontribusi terhadap kualitas pembelajaran. Sementara Herawati, Tobari, dan Missriani (2020) menemukan bahwa meskipun perencanaan dan pengadaan berjalan baik, aspek pemanfaatan, pemeliharaan, dan penghapusan fasilitas masih kerap kurang optimal.

Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah pertama, yaitu: Bagaimana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang ditinjau dari aspek perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi? Tujuannya adalah mendeskripsikan secara mendalam praktik pengelolaan fasilitas di sekolah swasta berbasis

Islam dengan karakteristik keterbatasan anggaran dan ruang fisik yang khas. Kebaruan penelitian ini terletak pada konteks lokus, yaitu SMP swasta berbasis Islam yang menghadapi tantangan survival policy dalam memaksimalkan fasilitas terbatas.

KAJIAN TEORITIS

1. Konsep Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan adalah pedoman operasional yang memiliki peran strategis dalam memastikan seluruh fasilitas pendidikan dapat menunjang proses belajar mengajar secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Syafaruddin (2024), kebijakan ini menjadi acuan utama bagi kepala sekolah, guru, dan pengelola sarpras untuk merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi seluruh tahapan pengelolaan fasilitas. Kebijakan yang jelas memungkinkan sekolah untuk menentukan prioritas pengadaan, mengatur jadwal penggunaan fasilitas, serta memaksimalkan pemanfaatan aset agar sesuai dengan standar nasional dan kebutuhan aktual peserta didik.

Secara operasional, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana mencakup enam tahapan penting yang saling terkait: (1) perencanaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan fasilitas; (2) pengadaan mencakup pembelian atau bantuan pemerintah dengan prinsip legalitas dan transparansi; (3) inventarisasi dilakukan secara sistematis dengan mencatat seluruh aset; (4) pemanfaatan memastikan fasilitas digunakan sesuai fungsi instruksional; (5) pemeliharaan meliputi tindakan preventif dan kuratif; dan (6) evaluasi dilakukan berkala untuk menilai kesesuaian fasilitas dengan standar nasional (Amalia, 2018; Djoko Sambodo, 2019).

2. Landasan Regulasi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Pengelolaan sarana dan prasarana sekolah berlandaskan pada beberapa regulasi nasional yang saling berkaitan secara hierarkis. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan menjadi payung umum yang menegaskan bahwa standar sarana dan prasarana merupakan bagian dari kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan. Regulasi ini kemudian diperbarui oleh PP Nomor 4 Tahun

2022 yang menekankan akuntabilitas dan keselarasan antara kebutuhan peserta didik dengan kapasitas sekolah.

Secara teknis operasional, Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana menetapkan jenis, jumlah, luas, dan fungsi fasilitas yang harus tersedia, mencakup ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, fasilitas olahraga, ruang ibadah, dan fasilitas pendukung lainnya. Sementara Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan mengatur bagaimana sekolah melakukan perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, evaluasi, dan penghapusan fasilitas secara sistematis (Kemendikbudristek, 2023).

3. Dimensi Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Perencanaan sarana dan prasarana merupakan tahap awal yang paling penting. Perencanaan dimulai dengan identifikasi kebutuhan berdasarkan kurikulum, jumlah peserta didik, kapasitas ruang, serta tujuan pembelajaran. Pemetaan kebutuhan secara akurat mencegah pemborosan dan pengadaan barang yang tidak

relevan. Perencanaan yang efektif bersifat partisipatif dan menekankan penentuan prioritas berdasarkan urgensi dan anggaran (Hendriansyah et al., 2024; Fitriani, Sari, dan Deni, 2025).

Pengadaan merupakan proses penyediaan fasilitas yang dibutuhkan sekolah. Sumber pengadaan dapat berasal dari pembelian mandiri, bantuan pemerintah seperti dana BOS, hibah, atau pembuatan mandiri. Prinsip utama dalam pengadaan meliputi legalitas, transparansi, efisiensi, dan kesesuaian kualitas dengan kebutuhan pembelajaran. Inventarisasi adalah pencatatan sistematis semua aset sekolah yang memungkinkan pemantauan, pengendalian, dan pertanggungjawaban aset (Djoko Sambodo, 2019).

Pemanfaatan memastikan fasilitas digunakan sesuai fungsi instruksional dan regulasi internal sekolah. Pemeliharaan meliputi tindakan preventif (pencegahan) dan kuratif (perbaikan) guna menjaga kondisi fasilitas selalu siap pakai. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk menilai kesesuaian fasilitas dengan standar nasional dan kebutuhan pembelajaran aktual, sekaligus

menjadi dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pengelolaan berikutnya (Faning Maulida, 2024; Setiono, 2018).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (case study). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang dalam konteks nyata di lapangan (Yin, 2018; Creswell, 2016). Pendekatan kualitatif memungkinkan analisis yang menekankan pemahaman deskriptif atas praktik pengelolaan fasilitas, bukan sekadar hubungan statistik antarvariabel.

Penelitian dilaksanakan di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang yang berlokasi di Dusun Borontok Barat RT 002/RW 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Subjek penelitian dipilih secara purposive sampling dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan sarana dan prasarana sekolah. Informan

penelitian meliputi: kepala sekolah (1 orang), wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana (1 orang), guru mata pelajaran (3 orang), dan siswa (3 orang).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) wawancara semi-terstruktur menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan aspek-aspek pengelolaan sarpras; (2) observasi langsung terhadap kondisi fisik sarana dan prasarana sekolah; dan (3) telaah dokumen inventaris sekunder tahun 2026. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar observasi, dan format telaah dokumen.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang meliputi empat tahapan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber (kepala sekolah, guru, siswa) dan triangulasi teknik (wawancara, observasi, dokumen). Member checking dilakukan untuk memastikan akurasi interpretasi data dengan para informan kunci.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Sekolah

SMP Islam Al-Istiqomah merupakan sekolah menengah pertama swasta berciri khas nilai-nilai agama Islam yang berdiri berdasarkan SK Pendirian Nomor 420/424-Dikdas tanggal 25 Februari 2016. Sekolah ini beralamat di Dusun Borontok Barat RT 002/RW 001, Desa Sindangsari, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan NPSN 69949381. Dipimpin oleh Bapak Faoz Sihabudin sebagai kepala sekolah, sekolah ini saat ini mengasuh 132 peserta didik yang terbagi dalam 5 rombongan belajar dan didukung oleh 13 orang tenaga pendidik dan kependidikan.

Sekolah ini telah meraih akreditasi B dengan nilai 83 dan menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai pedoman pembelajaran. Dari sisi infrastruktur, sekolah memiliki lima ruang kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru, UKS, tempat ibadah, toilet, gudang, dan lapangan. Sementara dari sisi sarana, tersedia 10 unit meja dan kursi guru, 5 papan tulis, 20 unit komputer/laptop, Smart TV, serta proyektor/LCD yang jumlahnya masih terbatas.

**Tabel 1 Profil SMP Islam Al-Istiqomah
Karawang**

Nama Sekolah	SMP Islam Al-Istiqomah
NPSN	69949381
Alamat	Dusun Borontok Barat RT 002/RW 001, Desa Sindangsari, Kec. Kutawaluya, Kab. Karawang
Status	Swasta (Yayasan)
Akreditasi	B (Nilai 83)
Kepala Sekolah	Faoz Sihabudin, S.Pd.
Jumlah Siswa	132 peserta didik (5 rombel)
Kurikulum	Kurikulum Merdeka
Tahun Berdiri	2016

2. Perencanaan Sarana dan Prasarana

Proses perencanaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru melalui mekanisme identifikasi kebutuhan yang bersifat partisipatif. Dalam proses ini, wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana mengumpulkan laporan dari para guru terkait kondisi fasilitas di masing-masing kelas dan ruang pembelajaran. Kepala sekolah kemudian memimpin rapat koordinasi untuk menyepakati skala prioritas kebutuhan berdasarkan kondisi riil fasilitas yang ada.

Penentuan prioritas dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan utama: (1) urgensi kebutuhan

terhadap keberlangsungan proses pembelajaran, (2) kondisi kerusakan atau kelayakan fasilitas yang ada, dan (3) kemampuan anggaran yang tersedia dari yayasan maupun dana BOS. Prinsip ini sejalan dengan temuan Hendriansyah et al. (2024) yang menyatakan bahwa pemetaan kebutuhan secara akurat menjadi landasan penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahunan dan strategi pemanfaatan fasilitas.

Meskipun demikian, terdapat kelemahan mendasar dalam aspek perencanaan ini, yaitu belum tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang (blue print) yang tertulis secara resmi. Proses perencanaan masih bersifat responsif terhadap kebutuhan mendesak, belum sepenuhnya proaktif dan berbasis analisis kebutuhan jangka menengah. Kondisi ini diakui oleh kepala sekolah sebagai kendala yang perlu segera ditangani, terutama dalam konteks pemenuhan standar Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2023 yang mensyaratkan adanya dokumen perencanaan pengelolaan sarpras yang terstruktur.

Keterbatasan ini konsisten dengan temuan Amalia (2018) di MAN Prambon Nganjuk yang menemukan

bahwa perencanaan berjalan cukup baik namun pengadaan masih terkendala anggaran, serta temuan Arnianti (2022) yang menunjukkan bahwa sekolah swasta cenderung sangat bergantung pada kemampuan finansial yayasan dalam tahap perencanaan. Kondisi demografi sekolah yang melayani 132 siswa dengan anggaran terbatas mendorong sekolah untuk memprioritaskan perbaikan fasilitas yang ada dibandingkan membangun infrastruktur baru.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana

Proses pengadaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah mengikuti alur yang cukup jelas, dimulai dari pengajuan proposal oleh wakil kepala sekolah bidang sarpras kepada kepala sekolah, yang kemudian diteruskan ke pihak yayasan untuk persetujuan anggaran. Sumber pembiayaan pengadaan berasal dari dua sumber utama, yaitu dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bersumber dari pemerintah dan dana operasional yayasan. Dana BOS digunakan terutama untuk pengadaan buku teks, alat tulis kantor, dan peralatan pembelajaran, sementara pengadaan

infrastruktur lebih banyak mengandalkan alokasi dari yayasan.

Berdasarkan data studi pendahuluan, sekolah telah berhasil mengadakan 20 unit komputer/laptop untuk mendukung program digitalisasi dan pelaksanaan ANBK (Asesmen Nasional Berbasis Komputer). Pengadaan ini merupakan salah satu realisasi program prioritas yang memerlukan waktu koordinasi cukup panjang antara pihak sekolah dengan yayasan. Selain itu, sekolah juga telah mengadakan Smart TV dan beberapa unit proyektor/LCD meskipun jumlahnya masih terbatas untuk melayani seluruh kebutuhan kelas.

Kendala utama dalam proses pengadaan adalah keterlambatan pencairan dana dari yayasan yang menyebabkan pemenuhan kebutuhan fasilitas tidak dapat dilakukan segera setelah kebutuhan teridentifikasi. Sebagai contoh konkret, kerusakan alat olahraga seperti bola voli dan net tidak langsung dapat diganti karena menunggu persetujuan dan pencairan anggaran dari yayasan. Kondisi ini sejalan dengan temuan Fadilaturrahman (2025) yang menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah swasta membutuhkan strategi dalam

menghadapi keterbatasan dana, dan temuan Safitri (2025) yang mengidentifikasi kesulitan pengadaan sarpras di sekolah sebagai tantangan umum yang dihadapi lembaga pendidikan swasta.

Dalam mengatasi keterbatasan tersebut, sekolah menerapkan prinsip selective purchasing, yaitu hanya melakukan pembelian barang baru jika fasilitas lama benar-benar tidak dapat diperbaiki. Strategi ini merupakan bagian dari survival policy yang diterapkan sekolah untuk mempertahankan keberlangsungan layanan pendidikan di tengah keterbatasan finansial. Sekolah juga aktif memanfaatkan program bantuan pemerintah dan mengoptimalkan alokasi dana BOS sesuai regulasi yang berlaku.

**Tabel 2 Sumber dan Mekanisme
Pengadaan Sarana Prasarana SMP Islam
Al-Istiqomah**

Sumbe r Dana	Jenis Kebutuh an	Alur Pengajua n	Kendal a
Dana BOS	Buku teks, ATK, perangk at ANBK	Sekolah → Dinas Pendidika n	Regula si penggu naan yang ketat
Dana Yayasa n	Infrastru ktur, alat olahraga ,	Sarpras → Kepsek → Yayasan	Keterla mbatan pencair an

	elektroni k		
Hibah/ Bantua n	Kompute r/laptop, sarana digital	Sekolah → Pemerinta h/Donatur	Tidak rutin tersedi a

4. Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Inventarisasi sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah dilaksanakan melalui sistem pencatatan manual menggunakan dokumen inventaris sekunder. Wakil kepala sekolah bidang sarpras bertanggung jawab atas pembaruan data inventaris yang dilakukan secara berkala setiap akhir tahun ajaran. Seluruh aset sekolah dicatat dalam buku induk inventaris yang memuat informasi tentang jenis barang, jumlah, kondisi, dan kode identifikasi barang.

Sistem pengodean yang diterapkan membedakan antara barang milik yayasan dengan barang yang bersumber dari bantuan pemerintah (dana BOS atau hibah). Pembedaan ini penting untuk keperluan pertanggungjawaban dan pelaporan kepada masing-masing sumber pembiayaan. Pemantauan mutasi atau perpindahan posisi barang, seperti proyektor yang dipindahkan dari satu kelas ke kelas lain, dilakukan

secara manual dengan pencatatan dalam buku mutasi barang.

Kendala teknis yang dihadapi dalam pengelolaan inventarisasi adalah belum adanya sistem inventaris berbasis digital atau aplikasi khusus. Sistem manual yang masih digunakan rentan terhadap ketidakakuratan data, terutama ketika terjadi perpindahan barang yang tidak langsung dicatat. Kondisi ini berbeda dengan rekomendasi Djoko Sambodo (2019) yang menekankan pentingnya pencatatan aset menggunakan Buku Induk Inventaris atau sistem digital seperti SIM-Sarpras agar data aset dapat dipantau dan dikontrol secara lebih efektif.

Meskipun demikian, inventarisasi yang dilakukan sekolah telah cukup memadai sebagai dasar pengelolaan aset yang bertanggung jawab. Dokumen inventaris sekunder yang disusun setiap akhir tahun menjadi referensi utama dalam proses evaluasi kondisi fasilitas dan perencanaan kebutuhan tahun ajaran berikutnya. Ke depannya, pengembangan sistem inventaris berbasis digital direkomendasikan untuk meningkatkan akurasi, aksesibilitas, dan kemudahan pemantauan aset secara real-time

(Habibur Rahman & Sugeng Listyo Prabowo, 2025).

5. Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pemanfaatan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah telah diatur melalui kebijakan internal sekolah yang cukup terstruktur. Kepala sekolah telah menetapkan aturan tertib penggunaan fasilitas, termasuk kebijakan pembatasan penggunaan Smart TV yang hanya diizinkan untuk keperluan pembelajaran, bukan untuk hiburan. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen sekolah untuk memastikan fasilitas teknologi dimanfaatkan secara tepat sasaran dan mendukung tujuan instruksional. Penggunaan proyektor/LCD diatur melalui mekanisme peminjaman yang dikoordinasikan oleh wakil kepala sekolah bidang sarpras. Guru yang memerlukan proyektor harus melakukan peminjaman terlebih dahulu untuk menghindari konflik jadwal penggunaan. Namun, dengan jumlah proyektor yang masih terbatas, tidak semua guru dapat menggunakan alat ini secara bersamaan, sehingga terkadang memerlukan penyesuaian jadwal pembelajaran.

Pemanfaatan fasilitas keagamaan menjadi salah satu keunggulan SMP

Islam Al-Istiqomah. Tempat ibadah tidak hanya digunakan untuk kegiatan ibadah rutin, tetapi juga dioptimalkan sebagai ruang kegiatan keislaman, pembelajaran agama praktis, dan pembinaan karakter. Hal ini merupakan implementasi dari survival policy sekolah, yaitu memaksimalkan fungsi ganda fasilitas keagamaan untuk mengatasi keterbatasan ruang pembelajaran lainnya.

Aspek yang masih perlu ditingkatkan adalah pemanfaatan perpustakaan. Saat ini, koleksi buku pustaka masih tergabung di ruang kantor guru, sehingga akses siswa terhadap bahan bacaan menjadi kurang optimal. Siswa harus memasuki ruang kantor guru untuk membaca atau meminjam buku, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi siswa maupun guru. Kondisi ini berdampak pada stagnansi budaya literasi di sekolah, sebagaimana disebutkan dalam Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 yang mensyaratkan ruang perpustakaan yang berdiri mandiri.

6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pemeliharaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah dilaksanakan melalui dua mekanisme: pemeliharaan preventif dan

pemeliharaan kuratif. Pemeliharaan preventif dilakukan melalui pengecekan kondisi fisik fasilitas secara berkala setiap enam bulan sekali oleh tim pengelola sarpras. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan kondisi meja dan kursi siswa, kebersihan toilet, kondisi papan tulis, dan kelayakan fasilitas elektronik seperti laptop dan AC kelas.

Pemeliharaan kuratif dilakukan sebagai respons terhadap laporan kerusakan yang diterima dari guru atau siswa. Guru yang menemukan kerusakan fasilitas di kelas diwajibkan melaporkan kepada wakil kepala sekolah bidang sarpras untuk ditindaklanjuti. Tindakan kuratif ringan yang dapat dilakukan secara mandiri, seperti penggantian bola lampu atau perbaikan engsel pintu, segera dilaksanakan tanpa menunggu persetujuan anggaran tambahan. Sementara tindakan yang memerlukan biaya lebih besar harus melalui proses pengajuan anggaran ke yayasan.

Kendala utama dalam pemeliharaan adalah keterlambatan perbaikan fasilitas akibat keterbatasan anggaran yayasan. Sebagaimana teridentifikasi dalam studi pendahuluan, kerusakan alat olahraga seperti bola voli dan net

tidak dapat langsung diganti atau diperbaiki karena menunggu persetujuan pencairan dana dari yayasan. Kondisi ini menyebabkan beberapa fasilitas dalam keadaan tidak optimal selama beberapa waktu, yang pada gilirannya berdampak pada efektivitas proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK).

Dalam membangun budaya merawat fasilitas, kepala sekolah dan guru secara aktif menumbuhkan kesadaran peserta didik untuk ikut bertanggung jawab terhadap kebersihan dan keutuhan fasilitas sekolah. Siswa dilibatkan dalam kegiatan piket kelas dan diedukasi untuk tidak merusak fasilitas, seperti tidak mencoret meja atau merusak gorden. Pendekatan ini merupakan strategi jangka panjang yang bertujuan memperpanjang usia pakai aset sekolah sekaligus membentuk karakter tanggung jawab pada peserta didik (Sopian, 2019).

7. Evaluasi Sarana dan Prasarana

Evaluasi sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan setiap tiga bulan sekali. Forum ini melibatkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang

kesiswaan, bidang kurikulum, dan bidang sarpras. Dalam rapat ini dibahas perkembangan kondisi fasilitas, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan. Mekanisme ini memungkinkan pengambilan keputusan yang kolektif dan berbasis informasi lapangan yang akurat.

Evaluasi kondisi fisik fasilitas dilakukan secara teknis melalui inspeksi berkala setiap enam bulan sekali. Inspeksi ini menggunakan lembar ceklis kondisi barang yang memuat kategori kondisi: baik, rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. Berdasarkan hasil inspeksi, wakil kepala sekolah bidang sarpras menyusun laporan kondisi fasilitas yang menjadi dasar pengambilan keputusan tentang perbaikan, penggantian, atau penghapusan aset. Proses tindak lanjut evaluasi meliputi tiga pilihan tindakan: (1) perbaikan mandiri untuk kerusakan ringan yang dapat dilakukan oleh tim sekolah; (2) pengajuan anggaran perbaikan kepada yayasan untuk kerusakan yang memerlukan tenaga ahli atau suku cadang; dan (3) penghapusan dari daftar inventaris untuk aset yang sudah tidak dapat diperbaiki. Prosedur penghapusan mengikuti ketentuan

yang berlaku dengan dokumentasi yang memadai untuk keperluan pertanggungjawaban kepada yayasan.

Kelemahan dalam aspek evaluasi adalah belum adanya indikator kinerja pengelolaan sarpras yang terukur dan terdokumentasi secara formal. Penilaian efektivitas pemanfaatan fasilitas masih dilakukan secara kualitatif berdasarkan persepsi pengelola, belum menggunakan instrumen evaluasi yang terstandarisasi. Faning Maulida (2024) menekankan bahwa evaluasi berkala yang sistematis dengan indikator yang jelas merupakan komponen kritis dalam manajemen fasilitas yang efektif, karena memungkinkan sekolah mengidentifikasi kekurangan dan merencanakan perbaikan berdasarkan data yang valid.

8. Ringkasan Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian terhadap keenam aspek pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang, berikut disajikan ringkasan temuan dalam tabel komparatif.

Tabel 3 Ringkasan Temuan Pengelolaan Sarpras SMP Islam Al-Istiqomah Karawang

Aspek	Kondisi yang Berjalan	Kendala Utama	Rekomendasi
Perencanaan	Identifikasi kebutuhan partisipatif, skala prioritas ditetapkan bersama	Belum ada blue print/program kerja tertulis resmi	Susun dokumen perencanaan jangka menengah yang terstruktur
Pengadaan	Dana BOS dan yayasan, alur cukup jelas	Keterlambatan pencairan, anggaran terbatas	Diversifikasi sumber dana, percepat alur persetujuan
Inventarisasi	Pencatatan manual, pembaruan setiap akhir tahun	Belum berbasis digital, potensi ketidakakuratan data	Kembangkan SIM-Sarpras digital sederhana
Pemanfaatan	Aturan tertib internal, optimasi fasilitas keagamaan	Perpustakaan belum mandiri, proyektor terbatas	Pisahkan ruang perpustakaan, tambah proyektor
Pemeliharaan	Pengecekan 6 bulan sekali,	Keterlambatan perbaikan akibat	Siapkan dana darurat pemeliharaan

	perbaikan mandiri ringan	anggaran terbatas	raan rutin
Evaluasi	Rapat koordinasi 3 bulan sekali, inspeksi berkala	Indikator evaluasi belum terstandarisasi	Kembangan instrumen evaluasi sarpras yang terukur

9. Pembahasan

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam memastikan berlangsungnya proses pembelajaran yang kondusif di tengah keterbatasan fasilitas dan anggaran. Keenam aspek pengelolaan yang diteliti telah diimplementasikan, meskipun pada beberapa aspek masih memerlukan penguatan, terutama pada kelengkapan dokumentasi, sistematisasi prosedur, dan ketersediaan anggaran yang memadai.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Husnun (2023) di SMA At-Ta'awun yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pengelolaan sarpras yang mengacu pada regulasi nasional berdampak positif terhadap efisiensi penggunaan fasilitas dan

kualitas pembelajaran. Namun, dalam konteks SMP Islam Al-Istiqomah, tantangan utama yang membedakan adalah karakteristik sebagai sekolah swasta kecil dengan keterbatasan finansial, yang memerlukan strategi adaptasi kebijakan yang lebih fleksibel dan kontekstual.

Fenomena survival policy yang teridentifikasi dalam penelitian ini merupakan respons rasional dari manajemen sekolah swasta terhadap kondisi keterbatasan sumber daya. Strategi ini mencakup pemaksimalan fungsi ganda fasilitas (khususnya fasilitas keagamaan), prioritas pada perbaikan daripada pengadaan baru, dan penerapan prinsip selective purchasing. Pendekatan ini, meskipun bersifat reaktif, merupakan cerminan dari kecerdasan adaptif kepemimpinan sekolah dalam menjaga keberlangsungan layanan pendidikan yang berkualitas bagi 132 peserta didiknya.

Temuan penelitian ini memperkaya literatur tentang manajemen sarpras di sekolah swasta berbasis Islam yang selama ini masih terbatas. Berbeda dengan sekolah negeri yang memiliki dukungan anggaran pemerintah yang lebih pasti, sekolah swasta seperti SMP Islam Al-Istiqomah harus

mengembangkan kreativitas manajerial dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Hal ini konsisten dengan rekomendasi Nauraida dan Triwiyanto (2024) yang menyarankan pendekatan manajemen berbasis konteks dalam mengatasi hambatan implementasi manajemen sarpras di sekolah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana di SMP Islam Al-Istiqomah Karawang telah dilaksanakan melalui enam aspek yang saling berkaitan, yaitu perencanaan, pengadaan, inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, dan evaluasi. Secara umum, seluruh aspek tersebut telah berjalan meskipun dengan tingkat efektivitas yang bervariasi dan masih menghadapi berbagai tantangan operasional.

Aspek perencanaan telah dilaksanakan melalui identifikasi kebutuhan partisipatif namun belum didukung dokumen perencanaan jangka panjang yang tertulis. Pengadaan bersumber dari dana BOS dan yayasan dengan alur yang jelas

tetapi terkendala keterlambatan pencairan. Inventarisasi dilakukan secara manual dengan pembaruan berkala, meskipun belum berbasis sistem digital. Pemanfaatan fasilitas telah diatur melalui kebijakan internal yang cukup tegas, termasuk penerapan survival policy berupa optimasi fasilitas keagamaan. Pemeliharaan dilaksanakan melalui pengecekan berkala setiap enam bulan, namun masih menghadapi keterlambatan perbaikan akibat keterbatasan anggaran. Evaluasi dilakukan melalui rapat koordinasi tiga bulanan dengan inspeksi fisik berkala. Rekomendasi utama yang dihasilkan dari penelitian ini adalah: (1) sekolah perlu menyusun dokumen perencanaan jangka menengah sarpras yang tertulis sebagai blue print operasional; (2) diperlukan pengembangan sistem inventaris berbasis digital sederhana untuk meningkatkan akurasi pencatatan aset; (3) perlu disiapkan dana cadangan darurat yang dialokasikan khusus untuk pemeliharaan rutin; (4) perlu dirancang pemisahan fisik ruang perpustakaan dari kantor guru dalam jangka menengah; dan (5) diperlukan pengembangan instrumen evaluasi sarpras yang terstandarisasi dan

terukur untuk memperkuat sistem evaluasi yang sudah berjalan.

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji kesesuaian kebijakan pengelolaan sarpras dengan Permendikbudristek Nomor 22 Tahun 2023 secara mendalam, serta menganalisis kendala dan upaya strategis sekolah dalam meningkatkan efektivitas layanan pendidikan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi sekolah swasta berbasis Islam lainnya dalam mengembangkan model tata kelola fasilitas yang adaptif, akuntabel, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing lembaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, S. Z. (2018). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah di MAN Prabon Nganjuk. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*.
- Arnianti. (2022). Penerapan Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di SMP Muhammadiyah 2 Makassar.
- Asep Sutisna, Rudi Kurniawan, & Okke Rosmaladew. (2026). Manajemen Sarana dan Prasarana untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di SMPN 1 Subang. *Jurnal Pendidikan*, 11.
- Creswell, J. W. (2016). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Djoko Sambodo. (2019). *Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sekolah (MPKKS-SAR)*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Fadilaturrahman. (2025). Meningkatkan Mutu Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 61 Pekanbaru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Faning Maulida. (2024). Strategi Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar. *JDMP (Jurnal Dinamika Manajemen Pendidikan)*, 8, 143-155.
- Fitriani, S., Sari, Y. Y., & Deni, R. (2025). Evaluation of School Facility Management: The Case of a High School Context in Indonesia. *Journal of Education*, 19(3), 1574-1582.
- Gunawan, A. H. (1996). *Administrasi Sekolah: Administrasi*

- Pendidikan Mikro. Rineka Cipta. 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana.
- Habibur Rahman & Sugeng Listyo Prabowo. (2025). Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Berbasis Digital untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Pembelajaran di Era Teknologi. *Pendas*, 10. Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan.
- Hendriansyah, R., Roesminingsih, E., Riyanto, Y., Khamidi, A., & Nursalim, M. (2024). Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Sekolah Indonesia Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan*, 5, 2485-2490. Megasari, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran di SMPN 5 Bukittinggi. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.
- Herawati, N., Tobari, & Missriani. (2020). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SD Negeri 20 Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(19), 1684-1690. Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Husnun, M. N. (2023). Analisis Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMA At-Ta'awun Cikedal Pandeglang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 72-87. Nauraida, I. D. & Triwiyanto, T. (2024). Hambatan dalam Implementasi Manajemen Sarana dan Prasarana di Sekolah: Sebuah Meta-Analisis. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 2(4), 35-45.
- Kemendikbudristek. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Rifo Fachrezzy, Debora, & Harie S., Jaya. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana pada Bengkel TBSM SMK Negeri 1 Palangka Raya. *Jurnal Pendidikan Kejuruan*, 11(2), 343-352.
- Safitri, M. (2025). Studi Literatur: Kesulitan Sekolah dalam Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembelajaran. *Jurnal Pendidikan*, 3(6).
- Setiono. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di SMK Muhammadiyah 1 Purbalingga. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Sopian, A. (2019). Manajemen Sarana dan Prasarana. *Jurnal Pendidikan Islam*, 4, 43-54.
- Syaifuddin, M. (2024). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan*, 8, 27207-27218.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Republik Indonesia.
- Widayanti, H., & Halimatussa'diyah. (2025). Analisis Pengelolaan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Kualitas Pembelajaran di SMK Negeri 1 Cijulang: Fokus pada Perencanaan dan Pengadaan. *Jurnal Pendidikan*, 2(2), 233-240.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.